

**JURNAL ILMIAH**

**KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP SISTEM DEMOKRASI  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG  
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM  
(Studi di Kabupaten Lombok Tengah)**



Oleh :

**M. AGUS JAYADI**  
D1A 010 132

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
2014**

**KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP SISTEM DEMOKRASI DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG  
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM  
(Studi di Kabupaten Lombok Tengah)**



**Oleh:**

**M. AGUS JAYADI**  
DIA 010 132

Menyetujui,  
Dosen Pembimbing ,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kafrawi', written over a horizontal line.

**Kafrawi, S.H., M.Si**  
NIP: 19590417 19803 1 001

## RINGKASAN

### **KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP SISTEM DEMOKRASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM ( STUDI DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH)**

Oleh : M. Agus Jayadi  
Pembimbing I : Kafrawi SH.,M.Si  
Pembimbing II : Johannes Johny Koynja SH.,M.Hum

Pemilihan Umum merupakan sarana pemberian kedaulatan kepada rakyat dan pergantian kepemimpinan bangsa secara teratur, sudah barang tentu membutuhkan manajemen yang baik.,Peranan Komisi Pemilihan Umum adalah memberikan pengetahuan, informasi dan pendidikan bagi segenap masyarakat baik tingkat nasional maupun tingkat lokal/daerah serta bekerjasama dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai pengawas jalannya pemilihan. Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah dalam sosialisasi merupakan proses penyampaian informasi mengenai sistem, tata cara teknis, tahapan, program dan jadwal, hasil pemilihan umum, serta hal-hal lain tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum legislatif tahun 2014.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut: Bagaimana tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah dalam mendorong kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Lombok Tengah dan Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat terhadap sistem demokrasi pada penyelenggaraan Pemilihan Umum legislatif tahun 2014 di Kabupaten Lombok Tengah.

Dari masalah yang dikaji, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian empiris,dengan menggunakan metode pendekatan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Aproach*),pendekatan konseptual (*Conseptual Aproach*), dan pendekatan sosiologis.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Tengah dalam mendorong kesadaran masyarakat dalam pemilihan Umum legislatif di Kabupaten Lombok Tengah yakni mengadakan sosialisasi tentang Pemilihan Umum legislatif kepada, sehingga Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pemilihan umum legislatif tahun 2014 di Kabupaten Lombok Tengah dapat dijelaskan sebagai berikut; Tingkat partisipasi pemilih tahun 2014 sebanyak 264,619 atau 74,2% pemilih, artinya masih lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 91,141 pemilih. Dari jumlah partisipasi pemilih tersebut 247.722 pemilih bisa menggunakan hak pilihnya dengan cara yang benar atau 93,6% pemilih , yakni dilihat dari jumlah surat suara sah, dan hanya 17.077 pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya dengan benar, dilihat dari jumlah surat suara tidak sah.

Dari yang dikemukakan, maka penyusun memberikan beberapa saran antara lain: Di harapkan pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kabupaten Lombok Tengah kaitannya dengan meningkatkan sosialisasi tidak hanya menyentuh daerah-daerah perkotaan namun juga daerah yang terpencil lebih intensif (baik melalui media maupun langsung) dan lebih banyak melibatkan partisipasi masyarakat dan diharapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Tengah dalam melakukan pendataan kerjanya lebih teliti dan cermat sehingga tidak ada lagi pemilih yang tidak terdaftar.

**KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP SISTEM DEMOKRASI DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN  
UMUM ( STUDI DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH)**

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah dalam mendorong kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Lombok Tengah dan mengetahui Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat terhadap sistem demokrasi pada penyelenggaraan Pemilihan Umum legislatif tahun 2014 di Kabupaten Lombok Tengah. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah empiris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan per uuan, pendektan konseptual dan pendekatan sosiologis. Adapun sumber dan jenis bahan hukum/data yang digunakan adalah sumber kepustakaan dan sumber lapangan. Hasil penelitian menunjukkan Tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Tengah telah mendorong kesadaran masyarakat dalam pemilihan Umum legislatif di Kabupaten Lombok Tengah yakni mengadakan sosialisasi tentang Pemilihan Umum legislatif kepada masyarakat dan Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pemilihan umum legislatif tahun 2014 di Kabupaten Lombok Tengah Secara kuantitatif meningkat terjadi pada pemilih yang menggunakan hak pilihnya secara benar, sedangkan pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya mengalami penurunan bila dibandingkan dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 359.460 (36%) dengan pemilih yang menggunakan hak pilihnya.

Kata Kunci : Kesadaran Masyarakat, Sistem Demokrasi, Pemilihan Umum

**SOCIETY AWARENESS SYSTEM AGAINST DEMOCRACY IN GENERAL  
ELECTION PURSUANT TO LAW PARAGRAPH 15 OF 2011 ON GENERAL  
ELECTION ORGANIZER (STUDY IN LOMBOK CENTER)**

**ABSTARCT**

This study aims to determine functions of the general elections commission(KPU) district central lombok in improving the conduct of public organization of legislative elections in 2014 and the level of public awareness in the democratic system in the 2014 legislative elections in the constituency of lombok center. This type of reserch is kind of normatik impirical legal risearch, the mothods used in this study is the approach to regulation by laws and regulations, the conseptual approach and sociological approach. As for the sources and legal materials/data that is used is the sourche of literature and field sources. Results showed in the tasks and function of the district election commision (KPU) in the lombok encourage public awareness in legislative elections held in district of central lombok socialization to the people of central lombok,so that the level of public awareness of the legeslative elections in 2014 in the district of central lombok quantitative increase occurred in voters using thir right to vote corriclty,whille voters who do not use the right exercise thir voting rights has decreased when compared to the amount of the final voters list as many as 359.460 or (36%) with voters using thir voting rights.

Keywords: Society Awareness, Democracy's Syystem,General Elections

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **Latar Belakang**

Bahwa pemilihan Umum merupakan sarana pemberian kedaulatan kepada rakyat dan pergantian kepemimpinan bangsa secara teratur, sudah barang tentu membutuhkan manajemen yang baik.

Secara yuridis, Indonesia telah mengamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22 E Ayat (5). Produk hukum dari amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Undang-Undang No 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggara pemilihan umum.

Dalam pelaksanaan pemilihan umum peran dan posisi Komisi Pemilihan Umum (KPU), khususnya di Kabupaten Lombok Tengah, tidak hanya sebagai penyelenggara/pelaksana dari pemilihan umum, namun lebih dari itu peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah memberikan pengetahuan, informasi dan pendidikan bagi segenap masyarakat serta bekerjasama dengan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) sebagai pengawas jalannya pemilihan.

Sehingga dari uraian diatas maka Peneliti mengambil judul: “Kesadaran Masyarakat Terhadap Sistem Demokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Studi Di Kabupaten Lombok Tengah)”.

Dilihat dari latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan yakni sebagai berikut: a. Bagaimana tugas dan fungsi Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah dalam mendorong kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Lombok Tengah; dan b. Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat terhadap sistem demokrasi pada penyelenggaraan Pemilihan Umum legislatif tahun 2014 di Kabupaten Lombok Tengah.

Tujuan dari penelitian ini adalah: a. Untuk mengetahui tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah. b. Untuk mengetahui Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat terhadap sistem demokrasi pada penyelenggaraan Pemilihan Umum legislatif tahun 2014 di Kabupaten Lombok Tengah.

Sedangkan Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain: a. Manfaat Teoritis dimana Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terkait dengan sistem demokrasi pada Pemilihan Umum. b. Manfaat Praktis dimana penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan informasi bagi masyarakat tentang Pemilihan Umum Legislatif. b. Manfaat Perguruan Tinggi dimana Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang digunakan di Perguruan Tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Terkait dengan metode penelitian, peneliti menggunakan Jenis Penelitian empiris, yakni jenis penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan/atau dengan meneliti kenyataan yang terjadi dalam kehidupan Masyarakat.

Sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah: a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*). b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). c. Pendekatan Sosiologis (*sociological approach*).

Sumber dan Jenis Data yang digunakan adalah: a. Data Primer, dimana Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui data kuantitatif dan wawancara. b. Data Sekunder, yakni Bahan kepustakaan yang berhubungan dengan pokok masalah yang di teliti.

Terkait mengenai Teknik Pengumpulan Data, peneliti menggunakan dua cara yakni: 1). Teknik Pengumpulan Data Primer dimana Pengumpulan data yang dilakukan secara langsung oleh peneliti kepada responden dan informan pada lokasi penelitian dengan Wawancara. 2). Teknik Pengumpulan Data Sekunder yakni dilakukan oleh penyusun melalui studi kepustakaan.

Sedangkan dalam menganalisis Data, peneliti menggunakan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **Tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah dalam mendorong kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Lombok Tengah**

Fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdapat dalam Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan: “Sebagai lembaga yang menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis”.

Sedangkan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum legislatif dalam Pasal 10 Ayat (1) angka 14 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan: “Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota kepada masyarakat.”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Indonesia Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Lembaran Negara Nomor 101 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246. Pasal 10 Ayat (1) angka 14



Menurut *Hyman* dalam *Rusnaini*, sosialisasi merupakan suatu proses belajar yang kontinyu yang melibatkan baik belajar secara emosional (*emotional learning*) maupun indoktrinasi politik yang manifest dan dimedia oleh segala partisipasi dan pengalaman si individu yang menjalaninya. Sosialisasi politik melatih individu dalam memasukkan nilai-nilai politik yang berlaku di dalam sebuah sistem politik.<sup>2</sup>

Sehingga untuk mewujudkan tujuan sosialisasi tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat mengeluarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 175/KPU/III/2014 tentang Optimalisasi Sosialisasi dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat.

Untuk menilai pelaksanaan sosialisasi yang telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Tengah maka penting untuk menguraikan pendapat *Lasswell* yang menjelaskan bahwa indikator suatu tindakan komunikasi dalam sebuah sosialisasi ialah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan “Siapa? “, “Mengatakan apa? “, “Dengan saluran apa? “, “Kepada siapa? “, “Dengan akibat apa? “.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penyusun, maka pelaksanaan sosialisasi yang telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Tengah, sesuai dengan indikator sosialisasi menurut *Lasswell* tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Siapa yang melakukan sosialisasi, yakni Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah; b. Apa yang disampaikan (materi/konten sosialisasi), Materi sosialisasi Komisi Pemilihan

---

<sup>2</sup> Reza Aulia Putra dan Muchid. *Efektifitas Sosialisasi KPU Dalam Pemilukada*. (Makalah, FISIP Universitas Riau) Pekanbaru 2011. Hlm 3

Umum Kabupaten Lombok Tengah, yaitu semua benda atau bentuk lain yang memuat program, simbol-simbol, atau tanda yang berkaitan dengan informasi semua tahapan dan program pemilihan umum yang disebar dan diketahui oleh masyarakat luas; c. Saluran yang digunakan, dilakukan dengan metode dan media yaitu: 1). media massa, 2). media cetak, dan 3). elektronik, dilaksanakan pada *Harian Nurani Rakyat, Lombok Pos, NTB Pos, Radio Mandalika, Radio Supra, RRI*. Sosialisasi media di luar ruangan, dalam bentuk; pembuatan baliho, pembuatan spanduk, pembuatan poster. Disamping itu, sosialisasi juga dilakukan dengan menggunakan mobilisasi massa. d. Siapa sasarannya, yakni 1). Masyarakat umum (perempuan, petani, buruh dan kelompok pekerja lainnya ), 2). remaja pemuda dan 3). siswa dari kelas 2-3 SMA (pemilih pemula), 4). wartawan dan kelompok media lainnya, 5). partai politik, pengawas/pemantau pemilihan umum, 6). Lembaga Swadaya Masyarakat dan pemilih dengan kebutuhan khusus (penyandang cacat, masyarakat terpinggirkan, penghuni lembaga pemasyarakatan, pedagang kaki lima dan kelompok lain yang serint terpinggirkan). e. Akibat yang dirasakan, untuk Meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya pemilih untuk berperan serta dalam setiap tahapan pemilihan umum, meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum.

Jadi tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Tengah tentang sosialisasi telah dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 175/KPU/III/2014 tentang Optimalisasi Sosialisasi dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat, yakni sosialisasi telah dilaksanakan dari sosialisasi kepada pemilih pemula, masyarakat yang memiliki hak memilih dan

kepada partai peserta pemilihan umum, hal ini dilakukan dengan tehnik ceramah, simulasi dan media masa sesuai.

**Tingkat kesadaran masyarakat terhadap sistem demokrasi pada penyelenggaraan Pemilihan Umum legislatif tahun 2014 di Kabupaten Lombok Tengah**

Menilai tingkat kesadaran masyarakat dalam pengertian ini adalah dalam bentuk data kuantitatif hasil Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 yang kemudian dibandingkan dengan Pemilihan Umum Legislatif tahun 2009, untuk mengetahui tingkat keberhasilan pemilihan Umum Legislatif tahun 2014. Tingkat partisipasi masyarakat ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel I**  
**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kabupaten Lombok Tengah Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009**

No	Kecamatan	Pemilih Sesuai DPT	Pemilih Hadir di TPS*			Surat Suara			% Partisipasi Pemilih*	% Pemahaman Pemilih*
			DPT	TPS	Jmh	Sah	Tdk Sah	Jmh		
1	Praya	70,396	54,853		54,853	49,894	4,959	54,853	77.9	91.0
2	Praya tengah	42,352	32,296		32,296	29,293	3,003	32,296	76.3	90.7
3	Janapria	54,337	38,335		38,335	32,775	5,560	38,335	70.6	85.5
4	Kopang	58,239	41,649		41,649	36,708	4,941	41,649	71.5	88.1
5	Batukeliang	50,964	38,132		38,132	33,354	4,778	38,132	74.8	87.5
6	Batukliang utara	33,366	23,660		23,660	21,309	2,351	23,660	70.9	90.1
<b>Jumlah</b>		309,654	228,925	0	228,925	203,333	25,592	228,925	73.9	88.8

**Tabel II**  
**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kabupaten Lombok Tengah Dalam**  
**Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014**

No	Kecamatan	Pemilih Sesuai DPT	Pemilih Hadir di TPS*			Surat Suara			% Partisipasi Pemilih*	% Pemahaman Pemilih*
			DPT	TPS	Jmh	Sah	Tdk Sah	Jmh		
1	Praya	83,804	64,167	255	64,167	60,267	3,900	64,167	76.6	93.9
2	Praya tengah	50,445	37,792	153	37,792	35,680	2,112	37,792	74.9	94.4
3	Janapria	59,082	43,379	184	43,379	40,847	2,532	43,379	73.4	94.2
4	Kopang	62,240	46,346	207	46,346	42,746	3,600	46,346	74.5	92.2
5	Batukeliang	60,705	44,244	185	44,244	41,487	2,937	44,244	72.9	93.8
6	Batukliang utara	40,184	28,691	120	28,691	26,695	1,996	28,691	71.4	93.0
<b>Jumlah</b>		356,460	264,619	1,104	264,619	247,722	17,077	264,619	74.2	93.6

Sehubungan dengan penjelasan tabel diatas tentang tingkat partisipasi pemilihan umum legislatif tahun 2009 dan tahun 2014 tersebut maka dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan kesadaran partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada tahun 2014 sebesar 74,2%, yang sebelumnya pada tahun 2009 sebesar 73,9%, yakni meningkat  $\pm 1\%$  . Peningkatan signifikan terlihat pada pemilih yang benar-benar memahami cara pencoblosan dengan baik dan benar, pada tahun 2009 sebesar 88,8% dan pada tahun 2014 menjadi 93,6%, meningkat  $\pm 5\%$  atau dengan kata lain pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya dengan baik dan benar mengalami penurunan, yang pada tahun 2009 sebanyak 25,592 pemilih sedangkan pada tahun 2014 menurun menjadi 17,077 pemilih. Hal ini membuktikan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah telah secara efektif dan berhasil dalam melakukan sosialisasi pemilihan umum kepada

masyarakat Lombok Tengah, sehingga secara statistik tentu saja data ini memperlihatkan bahwa masyarakat Lombok Tengah sudah cerdas dalam menggunakan hak pilihnya. Tabel diatas juga dapat diambil kesimpulan bahwa secara kuantitatif, pemilihan umum legislatif tahun 2014 jelas meningkat seiring bertambahnya pemilih, namun hal ini juga berbanding lurus dengan tingkat golput yang meningkat dari tahun 2009 berjumlah 80,729 yang tidak menggunakan hak pilihnya, sedangkan pemilihan umum legislatif termasuk tahun 2014 ini naik menjadi 91,141 pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya, meskipun secara peningkatan angka Golput ini tidak mempengaruhi persentase pemilihan umum legislatif tahun 2014, bahkan bisa dikatakan sama dengan pemilihan umum legislatif tahun 2009, namun secara kuantitas (jumlah) jelas angka “Golput”<sup>3</sup> meningkat pada tahun 2014.

---

<sup>3</sup> Pengertian Golput adalah suatu tindakan untuk tidak menggunakan hak suaranya untuk memilih pada saat pemilihan umum dengan berbagai alasan.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan di atas maka dapat disimpulkan beberapa penting mengenai tugas dan fungsi komisi pemilihan umum(KPU) dan kesadaran masyarakat terhadap sistem demokrasi dalam penyelenggaraan pemilihan umum legislatif tahun 2014 yakni, antara lain: a. tugas dan fungsi komisi pemilihan umum kabupaten Lombok tengah bersama pemerintah daerah,mahasiswa KKN universitas mataram,yayasan darul fahmi dan mahasiswa KKN universitas muhammadiyah mataram,dan pesantren nurussabah batunyalala telah mendorong kesadaran masyarakat dalam pemilihan Umum legislatif di Kabupaten Lombok Tengah; b. untuk mengetahui tingkat kesadaran masyarakat terhadap system demokrasi dalam pemilihan umum legislatif tahun 2014, peneliti melihat dari partisipasi pemilih. Dilihat dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari tiga daerah pemilihan praya-praya tengah, kopang-janapria, dan batu kliang-batu kliang utara berjumlah 356.460 dan yang melaksanakan hak pilihnya berjumlah 264.161 atau 74,2% sedangkan pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya berjumlah 91.141 pemilih. Artinya bahwa tingkat partisipasi pemilih lebih tinggi dari pada pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya, sehingga tingkat partisipasi pemilih mengalami peningkatan atau sudah baik.

Setelah peneliti mengamati dari hasil penelitian, maka peneliti memberikan beberapa masukan atau saran, antara lain,yakni: a. dalam meningkatkan sosialisasi tidak hanya menyentuh daerah-daerah perkotaan, namun juga daerah

yang terpencil, lebih intensif (baik melalui media maupun langsung) dan lebih banyak melibatkan partisipasi masyarakat. b. Di harapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Tengah dalam melakukan pendataan kerjanya lebih teliti dan cermat sehingga tidak ada lagi pemilih yang tidak terdaftar.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku dan Makalah

- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, cetakan ke tiga, edisi 1-3. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2001.
- Budihardjo, Meriam. *Partisipasi dan Partai Politik*. PT. Gramedia, Jakarta, 2004.
- *Dasar-dasar Ilmu Politik* (edisi revisi). Jakarta. 2008.
- Febrisartika. *Partisipasi Masyarakat dalam Politik sebagai Implementasi Nilai-nilai Demokrasi di Indoneisa*. Jakarta. 2013.
- Latifah, Ela Dewi. *Intensitas kesadaran dan kepedulian masyarakat daerah Balaraja terhadap Pemilihan Umum Lima tahunan*. Proposal Penelitian Universitas Palangkaraya. 2011.
- Nawawi, Zoul. *Ilmu politik (Pemilihan Umum)*; (Makalah) disampaikan pada Pemilihan Umum, Selasa 17 Mei 2011.
- Rakhmat, Jalaluddin. *Komunikasi Politik*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2005.
- Riawan, Tjandra. *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan ke-5. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Yogyakarta. 2012.
- Mukhlis, Abdul, '*Politik Uang dan Demokrasi di Indonesia*. (Makalah), Studi Kasus Dalam Pemilihan Umum Legislatif Anggota DPRD Kab Bangkalan, Bangkalan 4 November 2009
- Sumarjan, Selo. *Perkembangan Politik Sebagai Penggerak Dinamika Pembangunan Ekonomi*. Universitas Indonesia Press, Jakarta. 2000.
- Siswo, D.B. Paranoan dan Burhanuddin. Upaya Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di kabupaten kutai kertanegara (Jurnal vol. 2 administratif UNMUL) samarinda.
- Syaroni, Anas. *Kesadaran Masyarakat dan Kampanye Pemilihan Umum*. (Hasil Penelitian The Indonesia Institute, Bidang Politik), Jakarta. 2014.
- Purba, Omta. *Hubungan tingkat kesadaran politik dengan Partisipasi politik masyarakat pada kegiatan Pemilihan Umumkada 2010 di kelurahan*



*timbangan, kecamatan Inderalaya utara, kabupaten ogan ilir (Skripsi Universitas Sriwijaya). Padang. 2013.*

Putra, Reza Aulia dan Muchid. *Efektifitas sosialisasi kpu dalam pemilukada.* (Makalah, FISIP Universitas Riau), Pekanbaru. 2011.

**B. Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia, Undang-Undang No 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. LN No 101 Tahun 2011, TLN No 5246

Indonesia, Keputusan Komisi Pemilihan Umum No 679/kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014

Indonesia, Keputusan Komisi Pemilihan Umum No 267/kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014